



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RULLY DWI RATNAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 154284

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.008.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 497.250.000
2. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , WARISAN Rp. 231.250.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 55.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA NF12A1CF MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.700.000**D. SURAT BERTAGIH** Rp. 25.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 55.623.102**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.168.823.102**III. HUTANG** Rp. 70.651.833**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.098.171.269



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.